

**ANALISIS *REFOCUSING* ANGGARAN BELANJA
PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN DI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

**NATASHA JUSARA
NIM.07011181823020**

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Analisis *Refocusing* Anggaran Belanja Pada Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran di Sekretariat Daerah
Kota Palembang Tahun 2020”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

Natasha Jusara

NIM.07011181823020

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

1. Dra. Martina, M.Si

NIP. 196603051993022001

11 Juli 2022

Pembimbing II

2. Ermanovida, S.Sos, M.Si

NIP. 196911191998032001

01 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 19691110199411001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Analisis *Refocusing* Anggaran Belanja pada Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran di Sekretariat Daerah
Kota Palembang Tahun 2020”**

Skripsi
Oleh :
Natasha Jusara
NIM.07011181823020

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal Juli 2022

Pembimbing :

1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

2. Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP. 196911191998032001

Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 19691110199411001

2. Drs. Syaifudin Zakir, M.Si
NIP. 196512071992031004

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 19691110199411001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasha Jusara
NIM : 07011181823020
Tempat dan Tanggal Lahir : Prabumulih, 09 September 2000
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis *Refocusing* Anggaran Belanja pada Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat
Daerah Kota Palembang Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketdak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 11 - 09 2022

Yang membuat pernyataan,


Natasha Jusara

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jalani dan percaya dengan prosesmu sendiri”.

-Natasha Jusara-

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini
saya persembahkan untuk:**

- ✓ Kedua Orangtuaku, Papa Jusman
Aidil dan Mama Rasmani Daryanti
- ✓ Saudariku, Kakakku Anggia Jusara
dan Adikku Reva Aulia Jusara
- ✓ Teman-teman AP 2018
- ✓ Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang analisis *refocusing* anggaran belanja pada program pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2020. Latar belakang masalah penelitian ini ialah terdapat adanya pengurangan anggaran pada program dan kegiatan salah satunya program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 51% anggaran yang dikurangi dari jumlah anggaran sebelum adanya perubahan anggaran yang terjadi akibat dari Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan konsep teori perubahan anggaran menurut Forrester dan Mullins yang terdiri dari kebutuhan manajerial, tekanan lingkungan, dan masalah politik. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis data, *refocusing* anggaran belanja pada program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2020 menunjukkan telah sesuai dengan kebutuhan manajerial yang dibutuhkan, serta memiliki adanya penyesuaian anggaran belanja terhadap target yang ditentukan melalui penghematan belanja pada barang dan jasa. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran dapat lebih ditingkatkan lagi kinerja dengan menyediakan jenjang karir untuk memiliki kompetensi yang baik agar pencapaian target dan tujuan program pelayanan administrasi perkantoran di tahun berikutnya dapat lebih baik.

Kata Kunci : *Refocusing* Anggaran, Program pelayanan administrasi perkantoran Pandemi Covid-19.

Pembimbing I



Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Juli 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 19691110199411001

ABSTRACT

This study examines the analysis of budget refocusing on the office administration service program at the Palembang City Regional Secretariat in 2020. The background of this research problem is that there is a budget reduction in programs and activities, one of which is the office administration service program by 51% of the budget which is reduced from the total budget before the budget changes that occurred as a result of the Covid-19 Pandemic. This study uses the concept of budget change theory according to Forrester and Mullins which consists of managerial necessity, environmental pressure, and political concerns. The type of research used is descriptive with qualitative research methods. Based on data analysis, the refocusing of the budget for the office administration service program in 2020 shows that it is in accordance with the managerial necessity needed and has an adjustment of the budget against the target set through savings in spending on goods and service. The results of this study recommend that the implementation of the budget refocusing policy can be further improved by providing a career path to have good competencies so that the achievement of targets and objectives of the office administration service program in the following year can be better.

Keyword: Budget refocusing, office administration service program, Covid-19 pandemic.

Advisor I




Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Advisor II



Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, July 2022
Chairman Of Department Public Administration
Faculty Of Social and Political Science
University Of Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 19691110199411001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Refocusing Anggaran Belanja Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2020**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Sebagai tanda penghormatan dan terimakasih, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Papa Jusman Aidil S.Pd dan Mama Rasmani Daryanti yang selalu memberi doa, dukungan baik secara materil dan non materil, serta kasih sayang yang tiada hentinya.
2. Saudariku, Kakakku Anggia Jusara S.Pd dan Adikku Reva Aulia Jusara yang selalu memberikan dukungan dan doa.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA dan Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode tahun 2018-2022.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode tahun 2022-2026.
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Pembimbing Akademik
7. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu memberi bimbingan dan arahan dari awal sampai selesai pembuatan skripsi.
8. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu memberi bimbingan dan arahan dari awal sampai selesai pembuatan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik beserta Staf FISIP yang terlibat dari awal sampai akhir dalam perkuliahan ini.
10. Bapak R.M Farid Saleh, SE,MM selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang
11. Seluruh staf dan pegawai Sekretariat Daerah Kota Palembang khususnya bagian Keuangan dan bagian Umum.
12. Seluruh Sahabat dan teman-teman Administrasi Publik angkatan 2018.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Indralaya, Juli 2022



Natasha Jusara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
DAFTAR PUSTAKA	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tahun 2020.....	4
Tabel 2. Rincian Perubahan Anggaran Kegiatan yang dikurangi	5
Tabel 3. Rincian Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020 status Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). Virus *corona* adalah wabah virus yang membahayakan bagi manusia sehingga dapat menyebabkan kerugian material dan non material. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa, jumlah kasus yang telah terkonfirmasi positif di dunia yang dihitung dari awal tahun 2020 sampai bulan maret tahun 2021 sekitar 123.902.242 kasus. Wabah virus ini telah mengakibatkan korban jiwa manusia di Indonesia serta dampak lain bagi kerugian negara seperti di sektor sosial, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Sektor perekonomian adalah sektor yang sangat berdampak akibat Pandemi Covid-19.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (2020) menyatakan bahwa, “virus *corona* menyebabkan penurunan pada pendapatan negara sebesar 2,3% bahkan pernah berada di posisi terburuk pada penerimaan negara yaitu -0,4%, yang disebabkan oleh terjadinya defisit negara sebesar 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB)” (*CNBC News*, 2020). Pada tanggal 5 Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -5,32% jika dibandingkan dengan kuartal I yaitu 2,97% (Badan Pusat Statistik, 2020). Dari data tersebut, maka terlihat bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia menjadi lambat sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan stabilitas sistem keuangan negara.

Akibat dari peristiwa ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau regulasi dalam pengendalian dampak Pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diantaranya merupakan sebuah regulasi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas

sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020. Kemudian, ada kebijakan perubahan anggaran yaitu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 terkait *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Aspek dari kebijakan tersebut di fokuskan pada kesehatan, jaring penanganan sosial, dan stabilitas sistem keuangan negara atau pemulihan perekonomian. Selain Instruksi Presiden, adapun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Dari kebijakan dan peraturan ini, maka Pemerintah Pusat dapat menggerakkan kepada Pemerintah Daerah maupun pada instansi-instansi daerah agar dapat merealisasikan kebijakan untuk realokasi atau *refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran digunakan sebagai alternatif dalam menjaga stabilitas ekonomi disuatu negara, yaitu pelaksanaan menyusun ulang anggaran dengan menyesuaikan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam kebutuhan ekonomi disuatu negara serta sebagai percepatan dari penanganan suatu masalah seperti dampak dari penyebaran virus *corona* yang terjadi sekarang.

Munculnya *refocusing* anggaran menyebabkan terjadinya perubahan anggaran akibat kondisi keuangan negara yang tidak stabil dan sumber daya yang melemah (Purwanto, 2016) oleh pandemi Covid-19 sehingga perlu penyusunan kembali anggaran sesuai dengan kegiatan yang perlu atau kegiatan yang sebelumnya tidak anggarkan melalui perubahan anggaran. Perubahan anggaran merupakan suatu yang dapat terjadi apabila suatu anggaran tersebut tidak tercapai dengan baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya. Menurut Wildavsky (dalam Junita, 2015), perubahan anggaran ialah cara yang dilakukan oleh

pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki penyusunan dan penerapan anggaran sehingga dapat mencapai tujuan yang bervariasi termasuk dalam akuntabilitas, fleksibilitas, dan prediktabilitas.

Perubahan anggaran merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perencanaan keuangan ditengah-tengah tahun anggaran dengan tujuan agar dapat mempercepat penanganan Covid-19 yang telah mengakibatkan kerugian negara dengan memprioritaskan kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan atau instruksi Presiden. Pelaksanaan perubahan anggaran sebagian besar pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah instansi Pemerintah di Kota Palembang yang telah melaksanakan kebijakan perubahan anggaran atau *refocusing* anggaran dari penyesuaian program dan kegiatan Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 serta menindaklanjuti dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

Perubahan anggaran di Sekretariat Daerah Kota Palembang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) perubahan Sekretariat Daerah Kota Palembang, yang diatur sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 tahun 2020. Berdasarkan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kota Palembang, bahwa pelaksanaan perubahan anggaran ini dimaksudkan untuk kegiatan prioritas yang sebelumnya belum terlaksana, kemudian pada kegiatan lanjutan yang telah dianggarkan di tahun 2020 atau pada masa Pandemi Covid-19. Kemudian, dalam proses rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kota Palembang terdapat tugas tim yang diputuskan oleh Sekretaris Daerah Nomor 689/ KPTS/ IX/ 2020 yaitu:

1. Melaksanakan pengumpulan data perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2020
2. Melaksanakan penyusunan dan *review* perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2020

3. Menyampaikan laporan hasil penyusunan dokumen perubahan rencana kerja tahun 2020 kepada Sekretaris Daerah
4. Menyampaikan dokumen perubahan rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah Kota Palembang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Palembang.

Dari penjelasan mengenai keputusan Sekretaris Daerah dalam tugas tim perubahan rencana kerja, menurut Kepala Sub Bagian Perencanaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang bahwa terdapat perintah dari atasan (pusat) dalam *refocusing* anggaran melalui adanya perubahan anggaran untuk di masa Pandemi Covid-19 dan dalam percepatan penanganan Covid-19. Perubahan anggaran belanja dalam rencana kerja Setda Kota Palembang terdapat perbedaan dari sebelum maupun sesudah *refocusing* anggaran sesuai pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tahun 2020

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 45.061.000.000,00	Rp 43.705.357.000,00	(- 1.355.643.000,00)
2.	Belanja Langsung	Rp 148.035.943.421,00	Rp 96.820.551.264,00	(- 51.215.392.157,00)
	Jumlah	Rp 193.096.943.421,00	Rp 140.525.808.264,00	(-52.571.035.157,00)

Sumber: RENJA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Palembang

Terlihat pada tabel perubahan anggaran belanja tersebut, bahwa terjadinya penurunan pada anggaran belanja di Sekretariat Daerah Kota Palembang disebabkan karena adanya penundaan kegiatan akibat Covid-19, sehingga kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah lebih banyak kepada kegiatan penanggulangan Covid-19. Kemudian, banyak kegiatan yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya karena ketidaksesuaian target, sehingga berdampak juga pada perubahan anggaran program dan kegiatan yaitu terdapat pengurangan anggaran pada program di

Sekretariat Daerah Kota Palembang (RENJA Perubahan Sekretariat Daerah, 2020). Anggaran program yang berkurang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Rincian Perubahan Anggaran program yang dikurangi

No	Nama Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 59.497.823.750,00	Rp 29.058.568.071,00	(30.439.255.679,00)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 11.996.400.000,00	Rp 7.351.889.403,00	(4.644.510.597,00)
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 2.152.750.000,00	Rp 1.072.935.000,00	(1.079.815.000,00)
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 4.307.000.000,00	Rp 906.187.642,00	(3.400.812.358,00)
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja	Rp 2.748.614.750,00	Rp 917.619.762,00	(1.830.994.988,00)
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rp 10.042.080.000,00	Rp 4.784.238.297,00	(5.257.841.703,00)
7.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 2.677.700.000,00	Rp 768.781.490,00	(1.908.918.510,00)
8.	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Rp 1.310.000.000,00	Rp 45.000.000,00	(1.265.000.000,00)
9.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.890.473.000,00	Rp 818.984.745,00	(2.071.488.255,00)
10.	Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	Rp 6.500.831.000,00	Rp 3.035.739.797,00	(3.465.091.021,00)
11.	Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Rp 24.701.579.000,00	Rp 11.771.067.226,00	(12.930.511.774,00)
12.	Program Penegasan Batas Daerah	Rp 69.580.000,00	Rp 68.773.500,00	(806.500,00)
	Jumlah	Rp 126.894.831.500,00	Rp 60.599.784.933,00	-66.295.046.567,00

Sumber: Diolah oleh Peneliti merujuk pada Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2020

Berdasarkan tabel rincian perubahan anggaran program di Sekretariat Daerah Kota Palembang tersebut, jumlah pengurangan atau penurunan pada anggaran program dan kegiatan yaitu 12 program dan 62 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pengurangan hampir seluruh program di Sekretariat Daerah Kota Palembang. Dari 12 program tersebut, peneliti akan merujuk pada salah satu program dan kegiatan yang anggarannya di *refocusing* yaitu program pada pelayanan administrasi perkantoran.

Program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebuah kegiatan yang memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, karena faktor keberhasilan

dalam organisasi harus didukung oleh administrasi dalam suatu negara (Salam et al., 2021).

Adapun, pernyataan dari Bapak R.M. Farid Saleh, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang yaitu:

“Dari banyaknya program, salah satu program yang penting untuk dijalankan adalah program pelayanan administrasi perkantoran karena dalam memenuhi kebutuhan khususnya pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kantor di Sekretariat Daerah Kota Palembang, Program ini juga mencakup di seluruh bagian di Setda Kota Palembang yang terdiri dari 12 bagian. Dan program ini merupakan salah satu program yang mengalami perubahan dalam anggarannya di masa Pandemi Covid-19.”(Wawancara 09 Mei 2022).

Dari pernyataan Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Palembang bahwa, program pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah Kota Palembang meliputi sebuah kegiatan dalam kebutuhan kantor yang berupa pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan urusan administrasi. Dengan adanya Pandemi Covid-19, terdapat dampak pada perubahan anggaran yang cukup tinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebelum dilakukan perubahan pada program pelayanan administrasi perkantoran.

Adanya perubahan yang cukup tinggi, maka akan mengakibatkan juga terhadap efektivitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Palembang. Tabel perubahan anggaran program dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Rincian Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 89.300.000,00	Rp 65.522.500,00	(23.777.500,00)
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Rp 4.371.467.247,00	Rp 2.765.454.958,00	(1.606.012.289,00)
	c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 4.487.000.000,00	Rp 1.126.486.066,00	(3.360.513.934,00)
	d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Rp 450.000.000,00	Rp 263.168.400,00	(186.831.600,00)
	e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 1.868.813.000,00	Rp 1.652.275.000,00	(216.538.000,00)
	f. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 500.000.000,00	Rp 492.166.000,00	(7.834.000,00)
	g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 1.568.450.003,00	Rp 760.006.492,00	(808.443.511,00)
	h. Penyediaan alat tulis kantor	Rp 1.345.389.000,00	Rp 1.006.529.501,00	(338.859.499,00)
	i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 1.878.469.000,00	Rp 738.072.800,00	(1.140.396.200,00)
	j. Penyediaan komponen instalasi listrik	Rp 403.540.000,00	Rp 206.889.646,00	(196.650.354,00)
	k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 10.948.395.500,00	Rp 3.135.243.925,00	(7.813.151.575,00)
	l. Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 120.000.000,00	Rp 46.000.000,00	(74.000.000,00)
	m. Penyediaan makanan dan minuman	Rp 11.124.400.000,00	Rp 4.745.477.634,20	(6.378.922.365,80)
	n. Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Rp 7.220.600.000,00	Rp 2.705.400.149,00	(4.515.199.851,00)
	o. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Rp 13.122.000.000,00	Rp 9.349.875.000,00	(3.772.125.000,00)
	Jumlah	Rp 59.497.823.750,00	Rp 29.058.568.071,00	(30.439.255.679,00)

Sumber: Diolah oleh Peneliti merujuk pada Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2020

Berdasarkan tabel rincian perubahan anggaran pada kegiatan dari program pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2020 memiliki hasil persentase mencapai 51% berkurang anggaran yang ditetapkan sebelumnya dari jumlah kegiatan yang dihitung. Dari persentase yang dihasilkan, maka perubahan anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran tersebut dapat berdampak pada pengurangan capaian optimalisasi anggaran dari tahun sebelumnya yang dilihat dari sisi target atau sasaran yang dicapai. Sehingga pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran ini dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan yang ditetapkan, karena penunjang organisasi pada instansi

pemerintah untuk berkembang dengan baik harus dilihat dengan dukungan administrasi yang lengkap, baik, dan cukup sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan.

Terdapatnya pengurangan anggaran belanja di Sekretariat Daerah Kota Palembang yang berdampak juga pada kurangnya anggaran kegiatan, maka penulis ingin meneliti *refocusing* anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran di masa pandemi Covid-19, yang dimuat dalam judul “**Analisis *Refocusing* Anggaran Belanja Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2020**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

Bagaimana *refocusing* anggaran belanja pada program pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui *refocusing* anggaran belanja pada program pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, manfaat penelitian tersebut ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, khususnya di bidang ilmu administrasi publik tentang keuangan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan pada pelaksana dan pembuat kebijakan dalam pengimplementasian perubahan anggaran berupa konsep dari *refocusing* anggaran belanja program dan kegiatan di instansi Pemerintah pada masa Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmanegara, Weda Sasmita. 2021. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Andaliman Books.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. dan Kusufi, Syam. 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.

Skripsi/ Tesis

- Sinambela, Lamria. 2021. *Proses Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran Belanja Kegiatan Kewirausahaan Baru di Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan)*. Skripsi. Indralaya: Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
- Dahclan, Try. 2021. *Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Pada BAPELITBANG Kabupaten Kepulauan Aru)*. Tesis. Makassar: Program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Peraturan Pemerintah

- Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 (Corona Virus Disease)*. 2020. Jakarta: Sekretariat website JDIH BPK RI
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi*

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. 2020. Jakarta: Sekretariat website JDIH BPK RI

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). 2020. Jakarta: Sekretariat website JDIH BPK RI

Internet (Jurnal)

Dachi, A. 2021. Analisis Mengenai Refocusing Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan ,Pendapatan dan Aset Daeah di Kab.Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keuangan Daerah IPDN*, (Online), Vol. 18, No. 1, (<http://eprints.ipdn.ac.id/6163/1/>, diakses 8 Desember 2021).

Dobell, P., & Ulrich, M. 2002. Parliament's Performance in the Budget Process : A Case Study. *Jurnal Masalah Kebijakan*, (Online), Vol. 3, No. 5, (<https://irpp.org/research-studies/policy-matters-vol3-no5/>, diakses 1 Februari 2022).

Forrester, J. P., & Mullins, D. R. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Jurnal Administrasi Publik*, (Online), Vol. 52, No. 5, (<https://doi.org/10.2307/976806>, diakses 15 Januari 2022).

Fransisca, dkk. 2021. Manajemen Perencanaan Refocusing Anggaran Melalui Mbo Dalam Penanganan Perekonomian Di Masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, (Online), Vol. 3, No. 2, (<https://doi.org/10.31599/jmu.v3i2.961>, diakses 1 April 2022).

Junaidi, dkk. 2020. Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Halu Oleo*, (Online), Vol. 4, No. 2, (<https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>, diakses 1 Februari 2022).

Junita, A. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, (Online), Vol. 4, No. 2, (<https://ejournalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369>, diakses 11 Desember 2021).

Kenis, I. 1979. Effects Of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performace. *Jurnal Akuntansi*, (Online), Vol. 54, No. 4, (<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1109/ICMSS.2010.5578521>, diakses 1 Februari 2022).

Purwanto, A. 2016. Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, (Online), Vol. 16, No. 2, (<https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.198>, diakses 1 Februari 2022).

Salam, dkk. 2021. Fungsi Administrasi Perkantoran Modern dalam Mendukung Pelaksanaan Organisasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, (Online), Vol. 17, No. 1, (<https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.57>, diakses 19 Mei 2022).

Zebua, F. W., & Adib, Z. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, (Online), Vol. 3, No. 1, (<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1491>, diakses 1 Februari 2022).